BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KABUPATEN SIMEULUE

BUPATI SIMEULUE

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyusunan anggaran perlu menetapkan Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Simeulue.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Simeulue.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Biruen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

...../2

Dipindai dengan CamScanner

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2007-2012 Kabupaten Simeulue;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KABUPATEN SIMEULUE**

Pasal 1

Analisis Standar Belanja adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

...../3

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

Analisis Standar Belanja (ASB) dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Pasal 3

Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.

Pasal 4

Penyetaraan kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

Pasal 5

(1) Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Simeulue sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisakan dari peraturan ini.

Pasal 6

Analisis Standar Belanja (ASB) ini dipergunakan untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPK

Pasal 7

Rencana Kegiatan Anggaran SKPK yang belum ada/belum diatur dengan Analisis Standar Belanja ini, sebaran objek belanja dan besaran total biaya kegiatan ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten.

Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada Analisis Standar Belanja, maka penyesuaian standar belanja kegiatan akan diatur dengan keputusan Bupati.

...../ 4

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di : Sinabang
pada tanggal : 11 Maret 2010 M
25 R.Awal 1431 H

BUPATI SIMEULUE

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 11 Maret 2010 M
25 R.Awal 1431 H

SEKRETARIS DAERAH

MOHD. RISWAN. R

Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2010 Nomor 3

...../ 5

Dipindai dengan CamScanner